



Laporan Tahunan

MAHKAMAH AGUNG RI





PIDATO

**KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
PADA PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

JAKARTA, FEBRUARI 2017



Tiga **Persoalan Pengadilan**

Penanganan
Perkara
Lambat

Kesulitan
Mengakses
Pengadilan

Integritas
Aparatur
Rendah





Respon Strategis terhadap Tiga Persoalan Pengadilan

Penanganan Perkara Lambat

SEMA 2 Tahun 2014 (5 bulan tk pertama, 3 bulan tk banding)

SK KMA 119/KMA/SK/VII/2013 (waktu memutus perkara < 3 bulan)

SK KMA 214/KMA/SK/XII/2014 (penanganan di MA paling lama 250 hari)

Implementasi SIPP (*case management system*)

Penerapan teknologi dalam proses persidangan (*Audio to Text Recording*)



Respon Strategis

terhadap Tiga Persoalan Pengadilan



Kesulitan Mengakses Pengadilan

Menciptakan Forum yang dapat berperan dalam Penyelesaian Sengketa & Upaya Hukum disesuaikan dengan nilai ekonomis suatu perkara

Letak gedung pengadilan mudah dijangkau dan memaksimalkan zitting plaats & Pengadilan didesain untuk melayani orang biasa

Pembatasan Upaya Hukum Kasasi oleh Undang-Undang

Perma No 2 Tahun 2012 (Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP)

Perma No 2 Tahun 2015 ttg Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Perma No 1 Tahun 2014 ttg Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu

Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling PN dan PA





Respon Strategis terhadap Tiga Persoalan Pengadilan

Integritas Aparatur Rendah

SK KMA No 194A/KMA/SK/XI/2014 ttg
Pembentukan Tim Pembangunan Zona
Integritas MA RI

SK KMA No 151 A/KMA/SK/IX/2011 ttg
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern di Lingkungan MA

SEMA No 2 Tahun 2013 tentang
Larangan Memberikan Parsel kepada
Pejabat MA dan Pimpinan Pengadila

SK KMA No 134/KMA/SK/VIII/2016
tentang Pembentukan Tim Penghubung
MA RI Dalam Kerangka Kerjasama MA RI
dengan KPK

Kewajiban menyampaikan LHKPN dan LHKSN



Bidang Teknis Yudisial: **Manajemen Perkara**



rasio produktivitas memutus (*case-deciding productivity rate*) di atas 70% dari beban perkara



Rasio Penyelesaian Perkara (*clearance rate*) di atas 100%



prosentase perkara yang diselesaikan sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (*on time case processing*)



menurunnya prosentase perkara tunggakan dari keseluruhan perkara aktif (*case backlog*)



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENANGANAN PERKARA**





Keadaan Perkara 2016

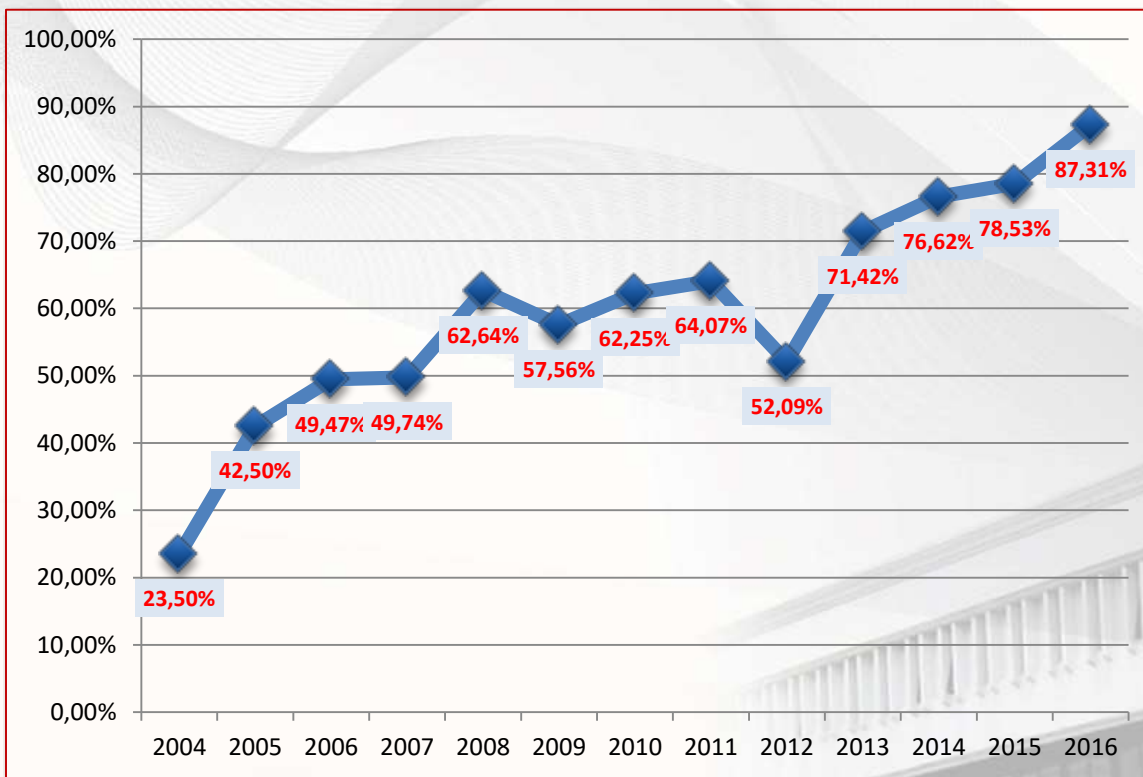
Sisa 2015	Masuk 2016	Jumlah Beban	Jumlah Putus	Sisa Akhir 2016
3.950	14.630	18.580	16.223	2.357





Rasio Produktivitas Memutus

Rasio Produktivitas Memutus : Tertinggi Dalam Sejarah



- **2016: 78,78%**
- **2015: 78,53%**



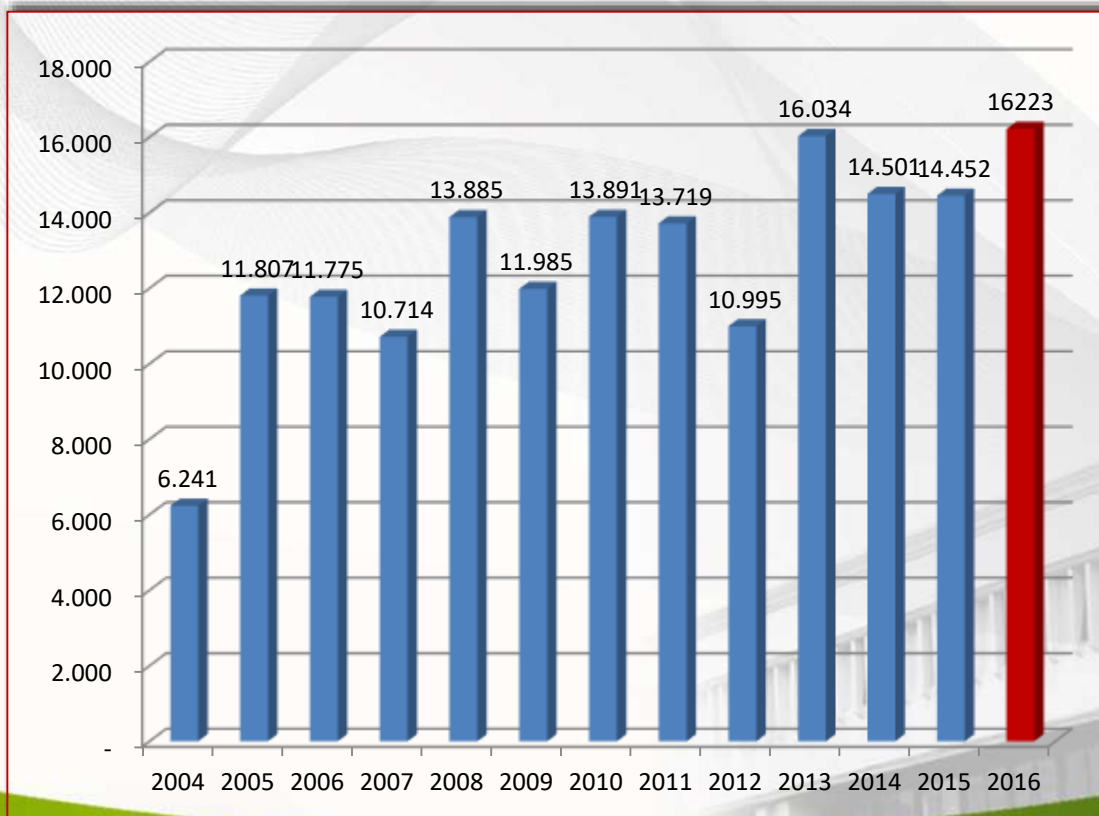
8,78%





Jumlah Perkara Putus 2016

Jumlah Perkara Putus : **Terbanyak Dalam Sejarah**



- **2016: 16.223**
- **2015: 14.452**



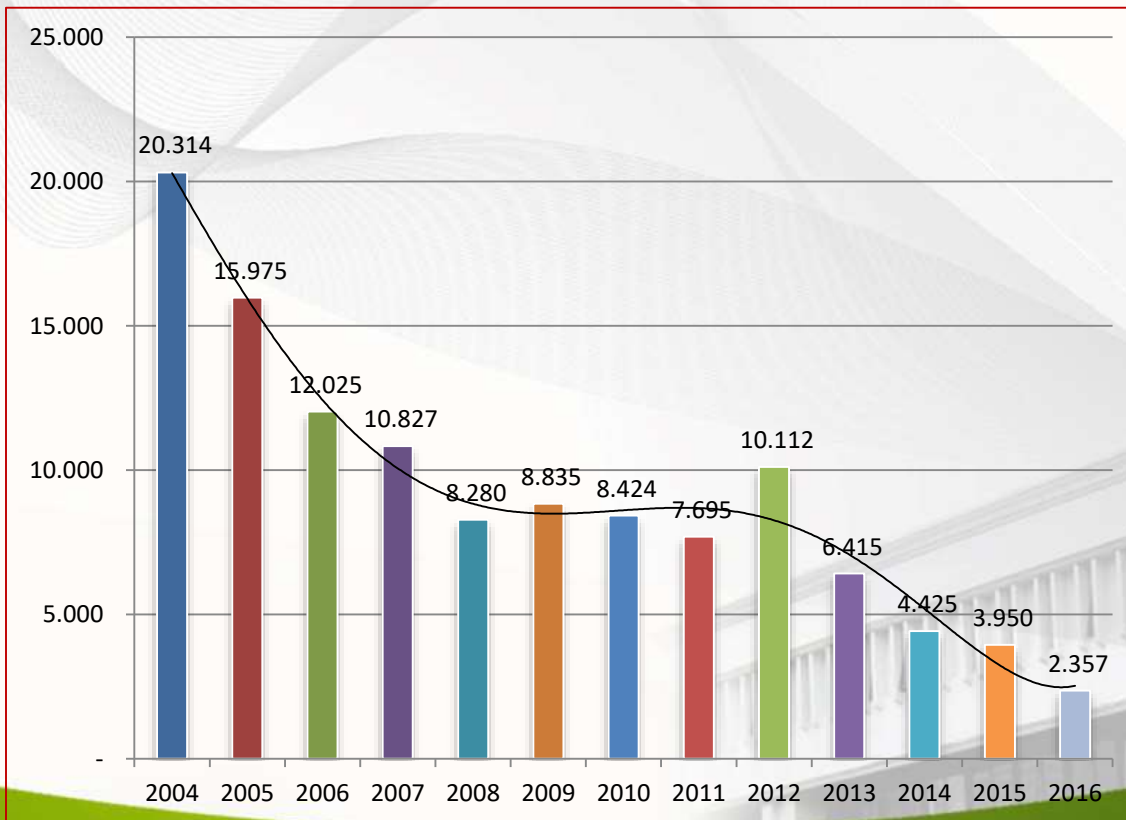
12,29%





Jumlah Sisa Perkara 2016

Jumlah Sisa Perkara : **Terkecil Dalam Sejarah**



- **2016: 2.537**
- **2015: 3.950**



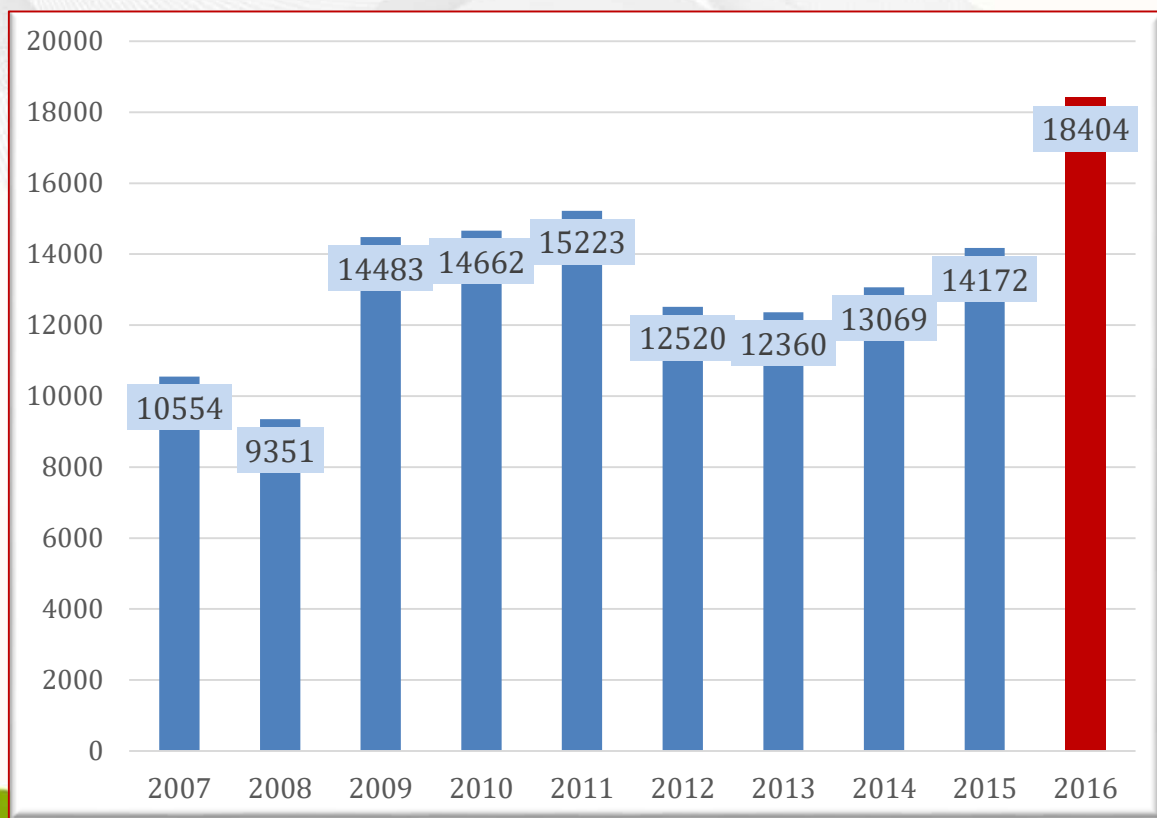
40,29%





Jumlah Minutasi Perkara 2016

Jumlah Minutasi Perkara : **Terbanyak Dalam Sejarah**



- **2016: 18.404**
- **2015: 14.172**



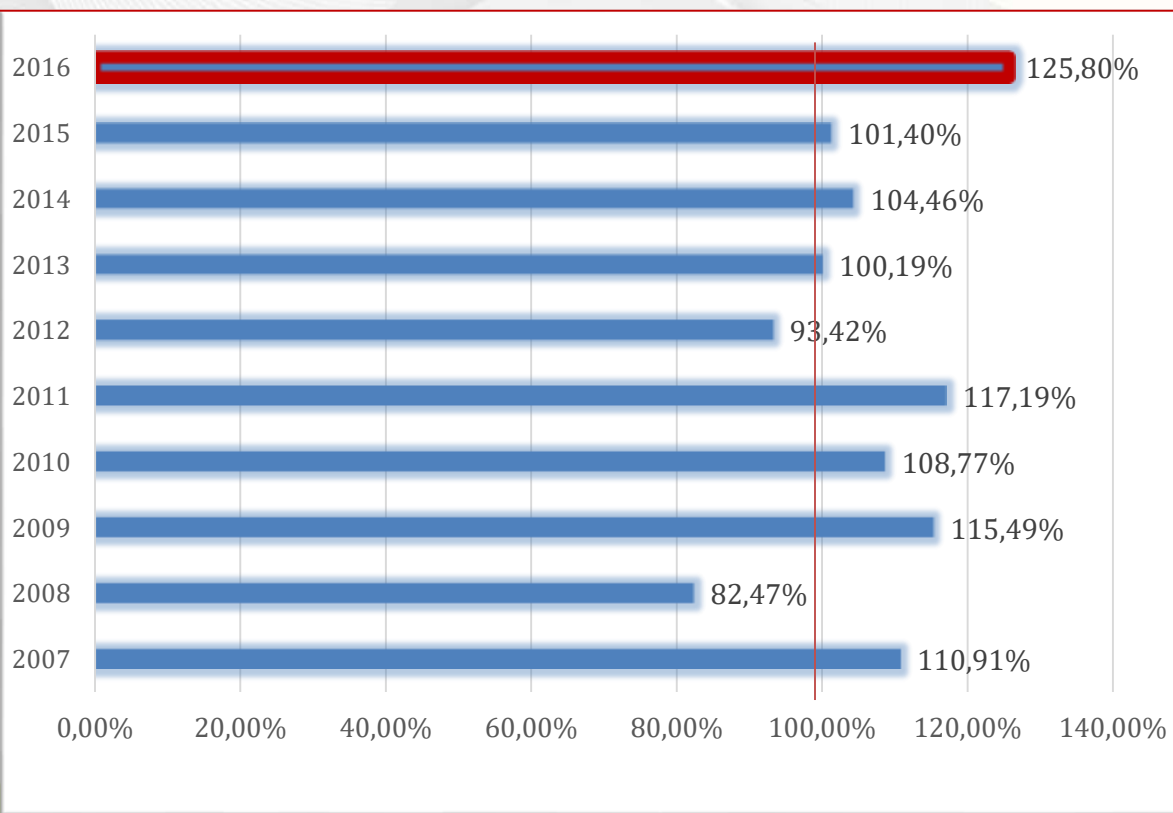
29,86%





Rasio Penanganan Perkara (Clearance Rate) 2016

Rasio Penanganan Perkara : **Terbesar dalam Sejarah**



- **2016: 125,83%**
- **2015: 101,40%**



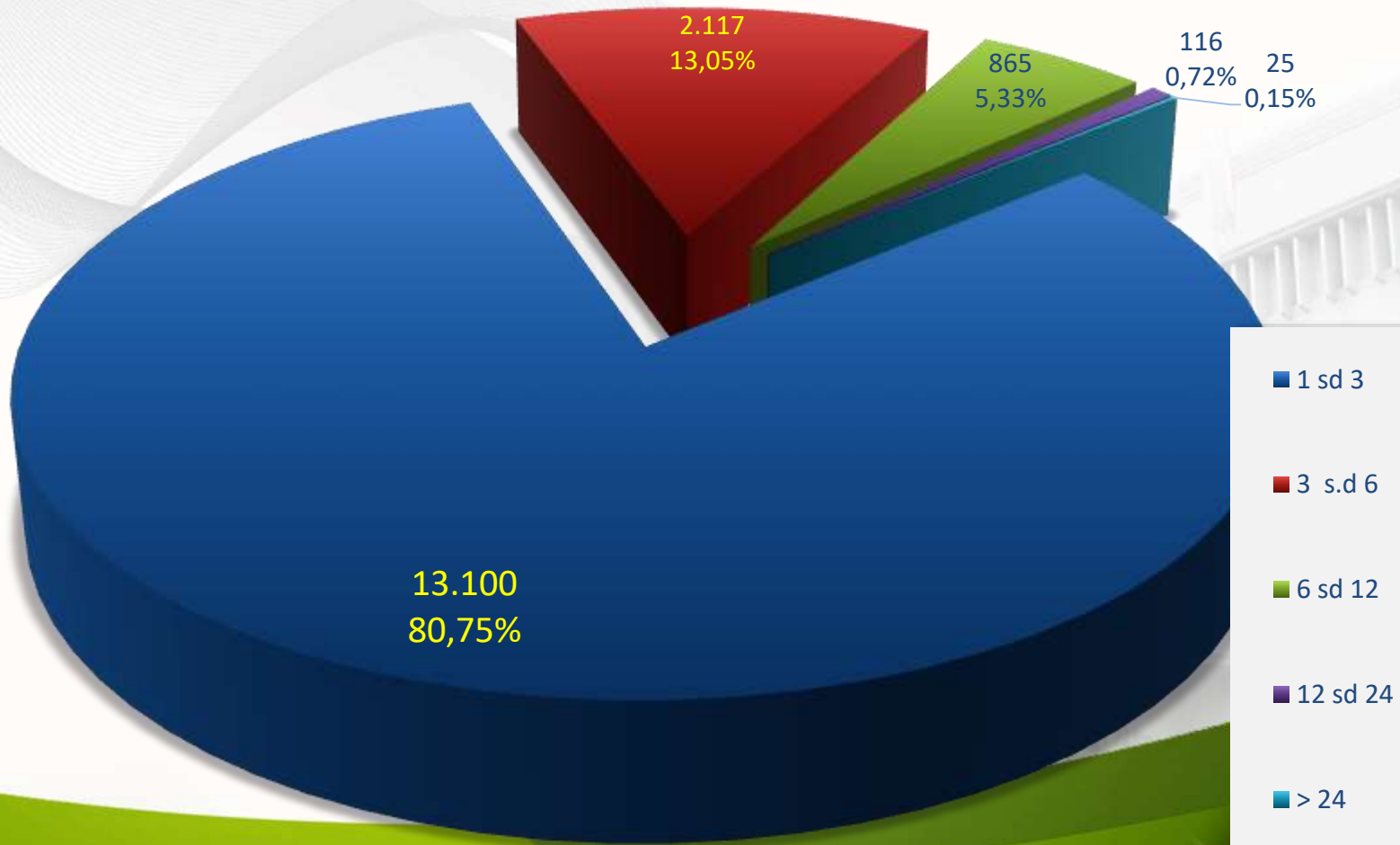
24,43%





prosentase perkara yang diselesaikan sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (*on time case processing*)

MA memutus 80, 75 % Perkara **Kurang Dari 3 Bulan**





Jangka Waktu Memutus Perkara Kasasi

78,37 % Perkara Kasasi Diputus Kurang dari 3 Bulan

No	JENIS PERKARA	Lamanya Proses Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 sd 3	3 s.d 6	6 sd 12	12 sd 24	> 24	
1	Perdata	3.205	770	400	3	18	4.396
2	Perdata Khusus	1.127	94	7	0	2	1.230
3	Pidana	1.585	71	0	0	0	1.656
4	Pidana Khusus	1.970	741	403	46	1	3.161
5	Perdata Agama	821	2	0	0	0	823
6	Pidana Militer	281	42	7	0	0	330
7	Tata Usaha Negara	581	32	1	1	1	616
Jumlah		9.570	1.752	818	50	22	12.212
%		78,37%	14,35%	6,70%	0,41%	0,18%	





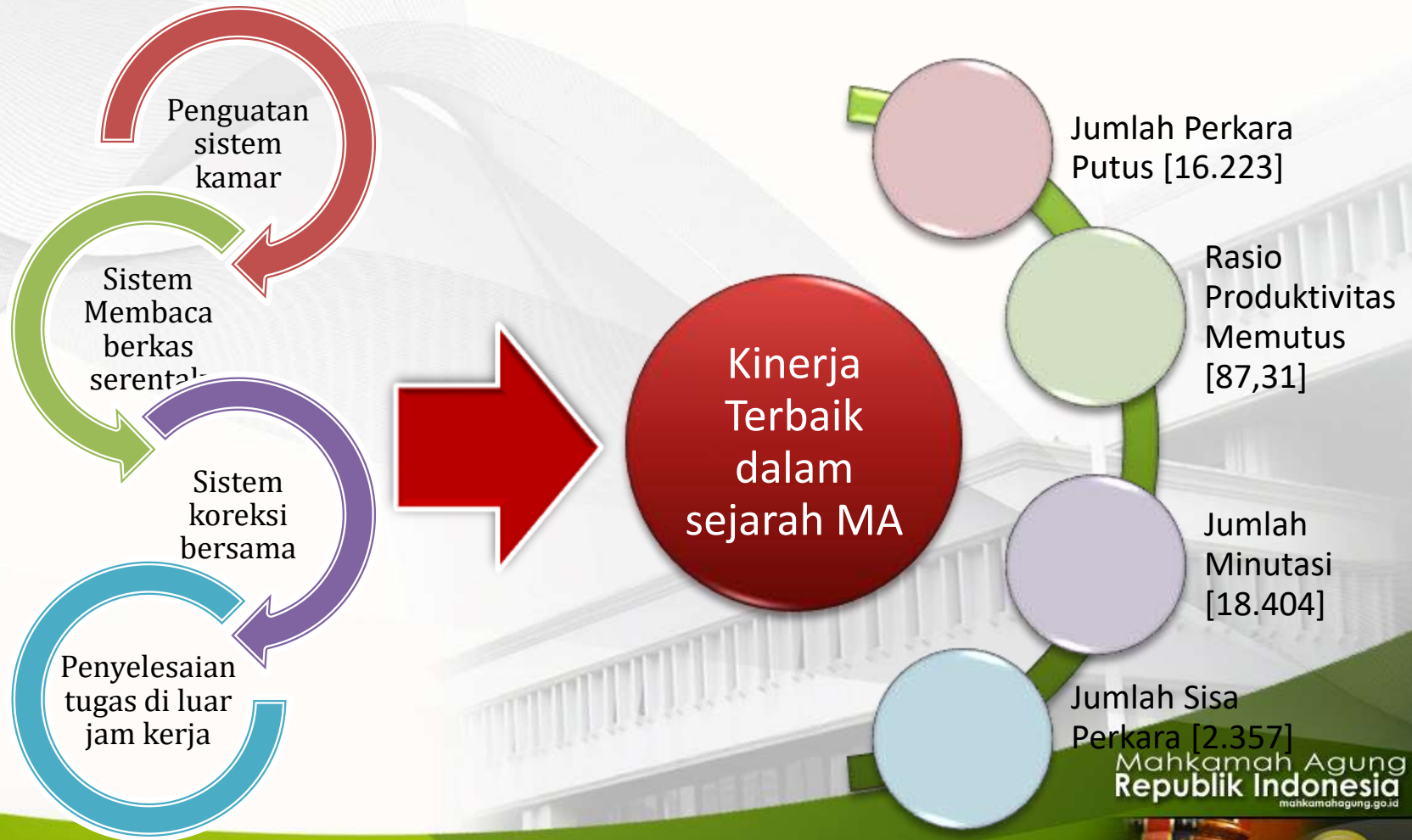
Jangka Waktu Memutus Perkara Peninjauan Kembali

87,87 % Perkara PK Diputus Kurang dari 3 Bulan

No	JENIS PERKARA	Lamanya Proses Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 sd 3	3 s.d 6	6 sd 12	12 sd 24	> 24	
1	Perdata	625	174	24	59	1	883
2	Perdata Khusus	136	17	3	2	0	158
3	Pidana	126	5	1	0	0	132
4	Pidana Khusus	193	21	14	3	0	231
5	Perdata Agama	121	2	0	0	0	123
6	Pidana Militer	10	5	4	0	0	19
7	Tata Usaha Negara	2.237	136	1	2	2	2.378
Jumlah		3.448	360	47	66	3	3.924
%		87,87%	9,17%	1,20%	1,68%	0,08%	



Catatan atas Kinerja Penanganan Perkara 2016





Keadaan Perkara Pengadilan Tk Pertama dan Banding

Lingkungan Peradilan	Sisa 2015	Masuk 2016	Jml	Putus	Cabut	Sisa
Peradilan Umum	37.231	3.344.569	3.381.800	3.323.333	7.168	51.299
Peradilan Agama	88.824	503.794	592.618	449.988	9.378	133.252
Peradilan Militer	391	3.672	4.063	3.469	44	550
Peradilan TUN	750	3.117	3.867	3.078	-	789
Pengadilan Pajak	170	10.158	10.328	1.110	-	9.218
Jumlah	127.366	3.865.310	3.992.676	3.780.978	16.590	195.108





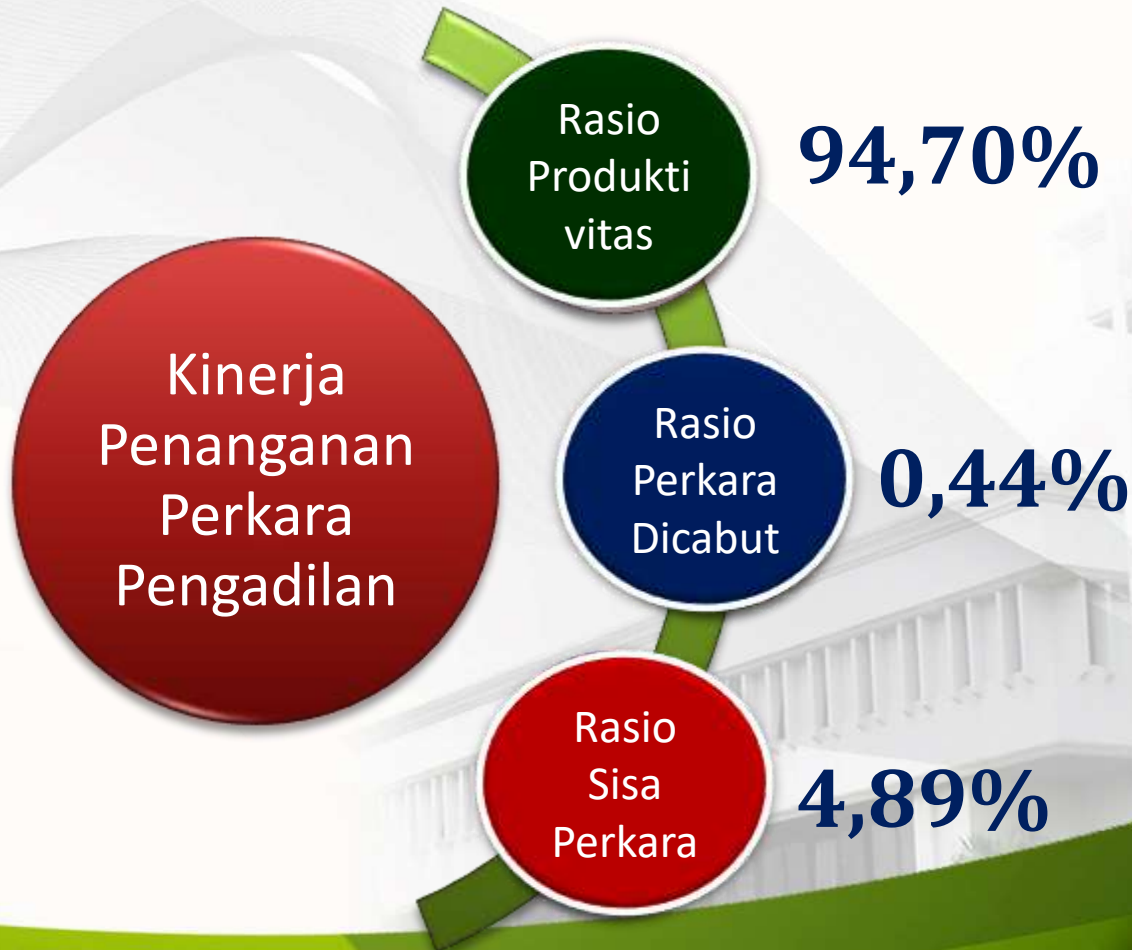
Keadaan Perkara Pengadilan Tk Pertama dan Banding

Keadaan Perkara	2016	2015		%
Masuk	3.865.310	4.584.119	↓	- 15,68 %
Jumlah Beban	3.992.676	4.712.673	↓	- 15,28%
Putus	3.780.978	4.541.648	↓	- 16,76%
Cabut	16.590	30.050	↓	- 44,79%
Sisa	195.108	140.975	↑	38,40%





Keadaan Perkara Pengadilan Tk Pertama dan Banding





Kontribusi Keuangan Perkara kepada Keuangan Negara

Jenis	Jumlah (Rp)
PNBP	42.604.688.951,30
Uang Denda dan Uang Pengganti yang dijatuhkan oleh Putusan MA	1.598.995.089.391,00
Uang Denda dan Uang Pengganti yang dijatuhkan oleh Putusan Pengadilan k Pertama dan Banding	2.660.590.857.083,00



Akses Terhadap Keadilan dan Peningkatan Pelayanan Publik



Access to
justice



Penguatan akses terhadap keadilan bagi perempuan dan anak



Pembebasan biaya perkara dan Pos Bantuan Hukum



Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan di Luar Negeri



Pelayanan Terpadu Sidang Keliling

Mahkamah Agung
Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id





Akses terhadap Keadilan bagi Perempuan dan Anak

- Mempersiapkan Kebijakan
- Mempersiapkan rencana pelatihan ToT

Pembentukan Pokja (SK No 88/SK/KMA/V/2016 jo SK 43/SK/KMA/IV/2015)

Membentuk 5 Pengadilan Negeri sebagai *pilot project*

- PN Stabat
- PN Kupang
- PN Cibinong
- PN Manado
- PN Sleman





Pembebasan Biaya Perkara

Lingkungan Peradilan	Jumlah Satker Pemberi Layanan	Jumlah Perkara Melalui PPBP*)
Pengadilan Negeri	227	316
Pengadilan Agama	359	26.451
Pengadilan TUN	28	12

*) PPBP: PROGRAM PEMBEBASAN BIAYA PERKARA





Pos Bantuan Hukum

Lingkungan Peradilan	Jumlah Posbakum	Jumlah Penerima Layanan
Pengadilan Negeri	352	9.897
Pengadilan Agama	120	195.023
Pengadilan TUN	28	13





sidang di Luar Gedung Pengadilan

Lingkungan Peradilan	Jumlah Lokasi	Jumlah Perkara
Pengadilan Negeri	83	1.194
Pengadilan Agama	370	67.986
Pengadilan Militer	47	209





sidang di Konsulat Jenderal RI
Di Luar Negeri oleh PA Jakarta Pusat

Tempat/Konjen RI	Jumlah Perkara
Konjen RI di Kuching	191
Konjen RI di Jeddah Arab Saudi	127
Konjen RI di Kinabalu Malaysia	200
Konjen RI di Tawau	263
Konjen RI di Kinabalu Malaysia (Desember 2016)	210





Pelayanan Terpadu Sidang Keliling

**571 perkara
Pengesahan
Nikah**
di Pengadilan
Negeri

**16.396
perkara Itsbat
Nikah**
di Pengadilan
Agama (362
lokasi)



2.061.320 Putusan Tersedia di Direktori Putusan per 31 Desember 2016



Jumlah Publikasi Putusan 2016 sebanyak **438.989** putusan



<http://jdih.mahkamahagung.go.id>



Pusat Publikasi Informasi Peraturan di Lingkungan MA

**JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDih)
MAHKAMAH AGUNG-RI**

Beranda Peraturan Penulisan Kebijakan Mahkamah Agung Yurisprudensi Hukum Acara Himpunan Putusan HUM

Isi Dokumen yang terdapat pada website

Google® dalam Search

JDih Pengadilan

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Lainnya...

Google Play Store

GET IT ON
Google Play

Pencarian File

Cari

Keputusan Peradilan Terbaru :

- PERMA NOMOR 13 TAHUN 2016
TATA CARA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI
- PERMA NOMOR 14 TAHUN 2016
TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH
- PERMA NOMOR 12 TAHUN 2016
TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS
- SEMA NOMOR 4 TAHUN 2016
PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN...
- PERMA NOMOR 11 TAHUN 2016
TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGERA PEMILIHAN DAN SENGKETA PELANGGARAN ADMINISTRAS...

Tersedia versi
Android di





**PENINGKATAN
PELAYANAN
PUBLIK**

Akreditasi Penjaminan Mutu
Pelayanan Pengadilan

Sertifikasi Pelayanan berbasis
ISO

Penerapan Manajemen
Pelayanan Inklusif





Program Akreditasi Penjaminan Mutu Pelayanan Peradilan



**PENGADILAN
NEGERI**

**67
sakter**

**PENGADILAN
TINGGI**

**7
satker**



CERTIFICATE

Management System as per
ISO 9001 : 2008PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
(PTUN) DENPASARJl. Kapten Cuk Agung Treana No. 4 RRI Mandala
Raton Denpasar, Bali 80235 - IndonesiaWe have a management system in place and the system complies with the following scope:
Court administration and other legal service in
Administrative Court of Denpasar

Certification Number: No. 18 001 10008

Valid until 31/12/2015
Product Group: ISO 9001:2008

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

TUV NORD CERTIFICATION

Sertifikasi Pelayanan Pengadilan berbasis ISO 9001:2008 dan 9001:2015



25 Satker Pengadilan Agama



8 Satker Pengadilan Militer

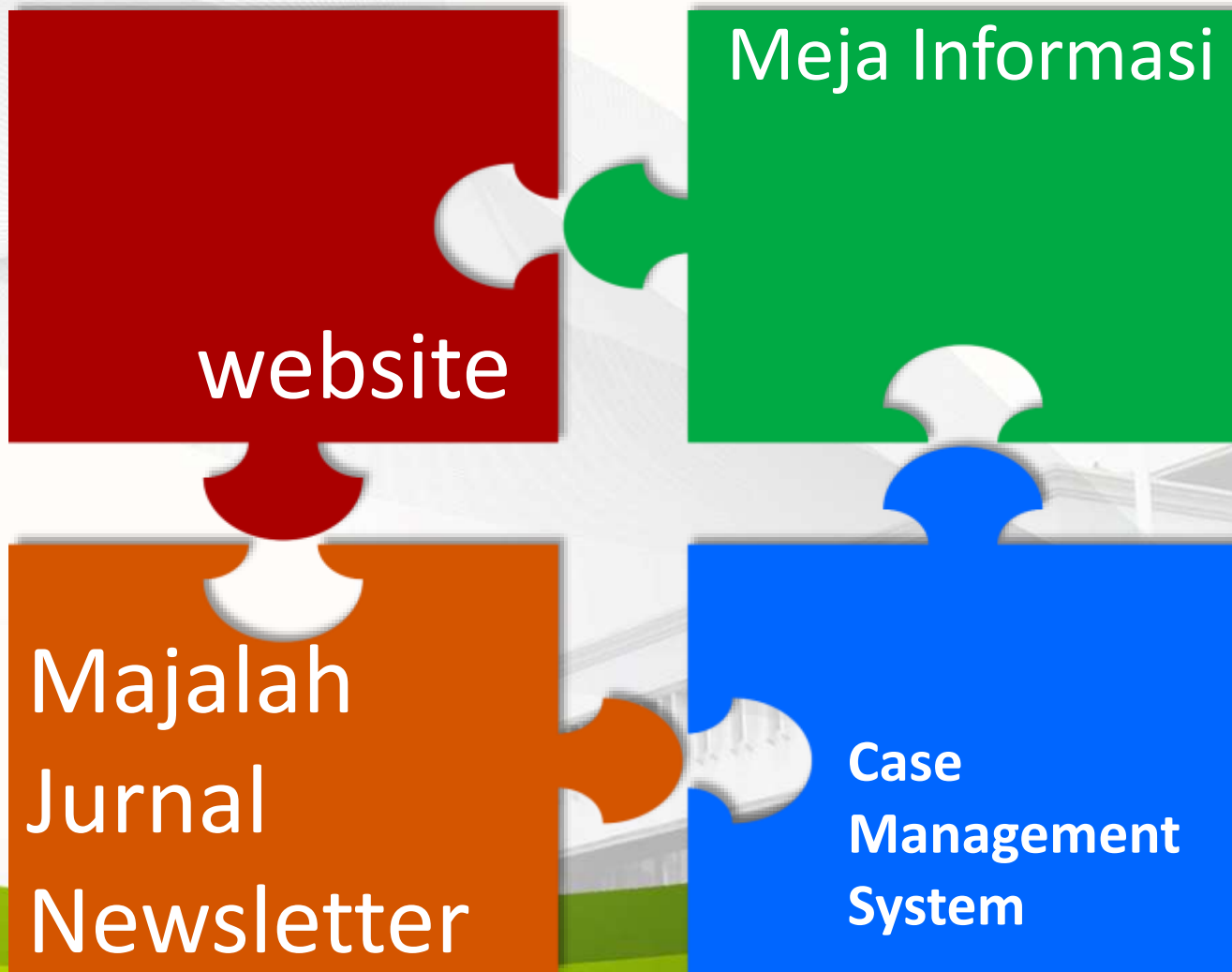


3 satker Pengadilan TUN





Penyebarluasan **Informasi Peradilan**





MANAJEMEN PELANANAN INKLUSIF

*website yang ramah bagi
penyandang tuna netra*

pendidikan dan pelatihan bagi
para hakim untuk lebih sensitif
dalam menyidangkan perkara
yang berkaitan dengan
penyandang disabilitas

prototype gedung pengadilan yang
ramah bagi penyandang disabilitas



Kebijakan **Bidang Teknis Yudisial**



- **SEMA Nomor 1 Tahun 2016** tentang Penghentian Penggunaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara Yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.
- **SEMA Nomor 2 Tahun 2016** tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan.
- **SEMA Nomor 3 Tahun 2016** tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan
- **SEMA Nomor 4 Tahun 2016** tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan



Kebijakan Bidang Teknis Yudisial



- **PERMA Nomor 1 Tahun 2016** tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- **PERMA Nomor 2 Tahun 2016** tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara
- **PERMA Nomor 3 Tahun 2016** tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum
- **PERMA Nomor 4 Tahun 2016** tentang Larangan Peninjauan Kembali dalam Putusan Praperadilan
- **PERMA Nomor 11 Tahun 2016** tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan
- **PERMA Nomor 12 Tahun 2016** tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas
- **PERMA Nomor 13 Tahun 2016** tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi
- **PERMA Nomor 14 Tahun 2016** tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.





Manajemen SDM

No.	Jabatan	Jumlah	Kebutuhan	Kekurangan
1	Hakim	7.989	12.847	4.858
2	Panitera Pengganti	9.180	19.575	10.395
3	Jurusita	3.990	10.020	6.030
4	Pegawai	10.247	21.669	11.422
Jumlah		31.406	64.111	32.705





Komposisi SDM Peradilan Indonesia

No	JABATAN	MA	Peradilan Umum		Peradilan Agama		Peradilan Militer		Peradilan TUN		Jumlah
			Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	
1	Hakim Agung	48	-	-	-	-	-	-	-	-	48
2	Hakim Tinggi Yustisial	54	-	-	-	-	-	-	-	-	54
3	Hakim Yustisial	79	-	-	-	-	-	-	-	-	79
4	Hakim	-	653	3.199	475	2.993	18	120	41	309	7.808
5	Panitera	-	675	4.835	335	2.898	16	32	78	311	9.180
6	Jurusita & Jurusita Pengganti	-	-	2.356	-	1.521	-	-	4	109	3.990
7	Tenaga Non Teknis	1.332	957	3.978	669	2.502	102	302	80	325	10.247
	Jumlah	1.513	2.285	14.368	1.479	9.914	136	454	203	1.054	31.406





SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Mahkamah Agung	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Jumlah	%
1	SD	14	90	30	4	3	141	0,4%
2	SLTP/ Sederajat	199	3.777	1.286	229	135	5.614	17,9%
3	SLTA/ Sederajat	13	147	33	8	1	202	0,6%
4	DI	0	1	1	0	0	2	0,0%
5	DII	1	8	14	0	1	24	0,1%
6	DIII	74	465	356	11	31	937	3,0%
7	DIV	0	6	4	0	0	10	0,0%
8	Profesi	8	14	8	0	1	31	0,1%
9	S1	716	8.616	6.937	251	751	17.288	55,0%
10	S2	495	3.420	2.630	85	321	6.947	22,1%
11	S3/ Doktor	36	72	92	2	9	210	0,7%
	Jumlah	1.556	16.616	11.391	590	1.253	31.406	





SDM Berdasarkan Rentang Usia

No.	Rentang Usia	Jumlah	Persentase
1	20-30	2.592	8%
2	31-40	9.045	29%
3	41-50	8.649	28%
4	51-60	10.051	32%
5	61-70	1.069	3%
Jumlah		31.406	100%

65%
Usia Produktif
< 50 tahun



Pengembangan Kapasitas SDM

Diklat Berkelanjutan

- Diklat hakim berkelanjutan
- Diklat panitera pengganti berkelanjutan,
- Diklat jurusita berkelanjutan,

Sertifikasi

- Sertifikasi Hakim Mediator, Hakim PHI, Hakim Perikanan, Hakim Niaga, Hakim Tipikor, Hakim Lingkungan, Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim Ekonomi Syariah

No	Diklat Sertifikasi	Tahun (orang)		Jumlah Peserta Diklat (hingga tahun 2016)
		2015	2016	
1	Sertifikasi Ekonomi Syariah	-	117	117
2	Sertifikasi Mediator	195	82	1.174
3	Sertifikasi Hakim PHI	83	107	621
4	Sertifikasi Hakim Perikanan	47	38	368
5	Sertifikasi Hakim Niaga	43	-	675
6	Sertifikasi Hakim Tipikor	119	119	1.880
7	Sertifikasi Hakim Lingkungan	116	74	343
8	Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak	237	208	694
Jumlah		840	745	5.872

Manajemen Keuangan

OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN

2012 2013 2014 2015

- kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
- kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*),
- kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
- efektivitas sistem pengendalian intern





Manajemen Keuangan

Pagu
Indikatif

Rp8.964.879.492.000,00

Pagu
Perubahan

Rp8.603.808.709.000,00

Realisasi

Rp 8.262.025.149.541,00

Realisasi
93,93%





Alokasi Anggaran Per Program

No	Program	Pagu Awal	Penghematan	Pagu Perubahan
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	7.193.290.909.000,00	125.000.000.000,00	7.068.290.909.000,00
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	1.100.620.900.000,00	67.536.600.000,00	1.033.084.300.000,00
3.	Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	162.270.100.000,00	0	162.270.100.000,00
4.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	116.141.000.000,00	0	116.141.000.000,00
5.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	71.956.600.000,00	0	71.956.600.000,00
6.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	22.831.000.000,00	0	22.831.000.000,00
7.	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	97.834.800.000,00	0	97.834.800.000,00
8.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung	31.400.000.000,00	0	31.400.000.000,00
	Jumlah	8.796.345.309.000,00	192.536.600.000,00	8.603.808.709.000,00





Realisasi Anggaran Per Program

No	Program	Pagu Perubahan	Realisasi	%
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	7.068.290.909.000,00	6.799.624.931.459,00	94,54%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	1.033.084.300.000,00	984.106.989.313,00	89,41%
3.	Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	162.270.100.000,00	154.390.611.944,00	95,14%
4.	Pogram Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	116.141.000.000,00	111.238.636.425,00	95,78%
5.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	71.956.600.000,00	70.476.420.504,00	97,94%
6.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	22.831.000.000,00	21.879.683.465,00	95,83%
7.	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	97.834.800.000,00	89.009.004.170,00	90,98%
8.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung	31.400.000.000,00	31.298.872.261,00	99,68%
Jumlah		8.603.808.709.000,00	8.262.025.149.541	93,93%





Penerimaan PNBP

TARGET	REALISASI	%
77.968.535508,00	70.285.229.268,00	90%





Penyelesaian Kerugian Negara

- ❑ PERMA Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.
- ❑ Penyelesaian kerugian Negara sampai dengan 31 Desember 2015 sebanyak 404 Kasus dengan Kerugian Negara sebesar Rp14.361.049.291,75
- ❑ Data perkembangan sampai dengan 31 Desember 2016, terdapat penambahan kasus sebanyak 92 Kasus sebesar Rp 6.057.541.037,85;
- ❑ Jumlah kasus kerugian Negara di lingkungan Mahkamah Agung sampai dengan 31 Desember 2016 adalah 496 Kasus dengan kerugian Negara sebesar Rp 20.418.590.329,60.
- ❑ Pada tahun 2016 kasus kerugian Negara mengalami kenaikan namun kasus tersebut telah berhasil ditindaklanjuti 100% sehingga kasus yang belum ditindaklanjuti pada tahun 2016 sebesar nihil.





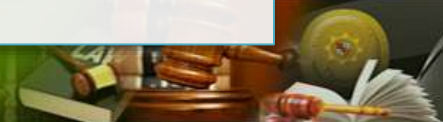
Pengembangan Sistem Informasi

Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan (Siwas),

Penerapan Aplikasi Penghitungan Panjar Biaya Perkara (e-SKUM),

Penerapan Aplikasi *Audio to Text Recording* (ATR),

Peningkatan Fungsi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Empat Lingkungan Peradilan,





Pengembangan Sistem Informasi

Peningkatan Fungsi Sistem Informasi Kepegawaian (Sikep),

Peningkatan Fungsi Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) di Mahkamah Agung,

Peningkatan Fungsi Aplikasi PNPB *online*,

Peningkatan Fungsi Aplikasi e-LLK,



Pengembangan Sistem Informasi

Peningkatan Fungsi Portal Sistem Informasi Mahkamah Agung RI Terintegrasi (SIMARI)

Peningkatan Fungsi Aplikasi Komunikasi Data Nasional (Komdanas),

Pengembangan Fitur *e-Exam* sebagai bagian dari peningkatan fungsi *e-Learning* Mahkamah Agung RI (ELMARI),

Penerapan *email* dengan domain @mahkamahagung.go.id,

Penerapan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)





Kinerja Pembinaan dan Pengawasan

Instrumen Kinerja Pengawasan

Perma No 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya

Perma No 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Perma NO 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistleblowing system) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya





Kinerja Pembinaan dan Pengawasan

Hukuman Disiplin Tahun 2016 Menunjukkan
Trend Menurun





Hakim Yang diajukan ke Sidang MKH

• 6 hakim

2015

• 3 hakim

2016

↓ 50%



Kinerja Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan

No	Kegiatan	2016
1	Penelitian Lapangan	8
2	Penelitian Kepustakaan	8
3	Jurnal Hukum dan Peradilan	3
4	Kompliasi dan Republikasi Putusan	4
5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Peneliti dan Non Peneliti	3
6	Seminar	2
7	Landmark Decision	1
8	Penelitian dan Kunjungan ke Luar Negeri	4
	Jumlah	33





Peran di Dunia Internasional



Dewan Ketua Mahkamah Agung ASEAN
(*Council of ASEAN Chief Justices*),

Ease of Doing Business 2017 di Washington
DC, Amerika Serikat

*ASEAN Judges Symposium on Law, Policy and
Climate Change*,

Konferensi Hakim Perempuan di
Seattle, Amerika Serikat

Kunjungan kerja dan studi banding ke negara-
negara di Asia, Eropa, Amerika, dan Afrika.



Kerjasama dengan Lembaga Internasional

European Union-UNDP Support to Justice Sector Reform in Indonesia (SUSTAIN)

- Pengawasan internal dan eksternal terhadap lembaga peradilan semakin meningkat,
- Manajemen organisasi dan SDM melalui database manajemen kinerja SDM
- dan implementasi berbagai kebijakan SDM lebih mutakhir

Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)

- Dukungan terhadap implementasi cetak Biru pembaruan 2010-2035;

Kedutaan Besar Belanda melalui Program Judicial Sector Support Program (JSSP)

- program pelatihan dan Workshop yaitu pendidikan Hakim dan Jaksa serta penyusunan sistem penganggaran pengadilan

Japan International Cooperation Agency (JICA)

- penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung RI di bidang Hak Kekayaan Intelektual, serta Pendidikan dan Pelatihan bidang HKI bagi Hakim baik di Jepang maupun di Indonesia.

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi

- mengirimkan Hakim-hakim dari lingkungan peradilan agama untuk mendalami hukum ekonomi syari'ah di Sekolah Tinggi Peradilan Al-Imam Muhammad Ibnu Saud Islamic University



TERIMA KASIH

**Mahkamah Agung
Republik Indonesia**
mahkamahagung.go.id

